

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan teori

#### 2.1.1 Teori kegunaan informasi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut. “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi.

Agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *SFAC* No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder Teori kegunaan-keputusan informasi sangat relevan, karena Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2005 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *SFAC* No. 2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **2.1.2 Laporan keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### 2.1.3 Kualitas laporan keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2007). Salamun (2007) menyatakan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, asumsi dasar tersebut meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pelaporan keuangan sektor publik juga disusun atas dasar prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berkaitan dengan entitas pelaporan, Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 96 menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri atas 2 (dua) tahapan.

- 1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.1.4 Kompetensi Sumber daya manusia**

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo 2005).

#### **2.1.5 Pemanfaatan teknologi informasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).

#### **2.1.6 Pengendalian internal**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum yang meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi yang meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

## 2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik masih relatif sedikit, karena bidang pemerintahan masih terbilang baru dalam dunia akuntansi di Indonesia, berbeda dengan pada sektor swasta. Pada sektor swasta, kualitas laporan keuangan dapat dilihat hanya dari laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang biasanya tercermin dalam laba atau *earnings*, sedangkan pada sektor publik, penilaian atas kualitas laporan keuangan tidak dapat dinilai hanya dari laporan keuangan yang dihasilkan saja atau dari faktor yang bersifat kuantitatif.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian di Indonesia tentang kualitas laporan keuangan diantaranya Mahaputra dan Putra (2014); (Tut Madiguna Agung, 2018); (Febry Perdana Kusuma, 2016); (Evicahyani, 2016); (Sukmaningrum T. , 2012) dan lainnya.

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

Penelitian (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Mahaputra dan putra (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan daerah (studi	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem	Kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal,

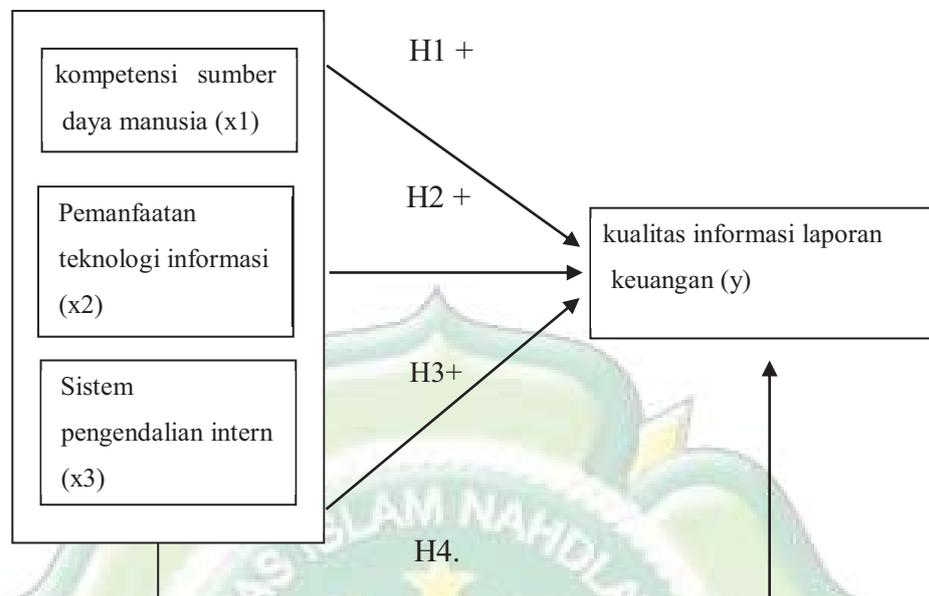
	empiris kabupaten ganyar)	pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan	pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.
(Tut Madiguna Agung, 2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	gaya kepemimpinan, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan	gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(Febry Perdana Kusuma, 2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten jembrana	kualitas SDM, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan TI, sistem pengendalian intern, kualitas informasi LKPD	Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi LKPD Jembrana.

(Sagung Inten Evicahyani, 2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tabanan	SDM, SAP, SIPKD, SPIP, LKPD.	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan, terhadap kualitas LKPD
(sukmaningrum, 2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten /kota di provinsi riau )	Kualitas informasi laporan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu(Evicahyani1, 2016)

### 2.3. Kerangka pemikiran teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:



**Gambar 2.3 Kerangka pemikiran teoritis**

Berdasarkan kerangka koseptual tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### 2.4. Perumusan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono, 2011). Dalam penelitian ini hipotesis yang dapat diambil adalah.

#### **2.4.1 kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan**

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (prasetyo,2011),(setiawati,2014) sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan.kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu,organisasi/kelembagaan ,maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenanganya untuk mencapai tujuanya secara efektif dan efisien.

*H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan*

#### **2.4.2 pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan**

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008).

Teknologi informasi bukan semata pada penggunaan komputer yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. tetapi teknologi informasi juga mencakup dalam pengiriman dan penyampaian informasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola. Keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Melalui perkembangan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas. maka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses. mengelola. Dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat semakin terbuka lebar. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi pula kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan.

Pemanfaatan teknologi ini berperan penting dalam memudahkan pengelolaan data serta informasi sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kualitas informasi yang dihasilkan (Jogiyanto, 2006). Penelitian sebelumnya oleh (Indriasari D. d., 2008) dan (Winidyaningrum, 2010) memperoleh hasil

adanya hubungan positif pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

*H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.*

### **2.4.3 sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan**

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah (PP 60 tahun 2008).

Sistem Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi, Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian internal merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan.

(Indriasari D. d., 2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. (Nugraha, 2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

*H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.*

